

Analisis Pengaruh *Governance Structure*, *Governancce Process* dan *Governance Outcome* Terhadap Rasio BOPO

¹Tri Damayanti

¹*Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹trierierie@yahoo.com

Abstract: The purpose of this study was to analyze the influence of structure *Governance*, *Governance Process* and *Governance Outcome* of the Operational Risk. Identifying more about operational risk in the implementation of GCG in banking with a view of the Operational Costs Against Operating Income (BOPO) as an indicator of operational risk occurring and measured with three aspects of *Governance*, *Governance Structure*, *Governance Process* and *Governance Outcome*. Suggested in this study, the company carry out an assessment of the implementation of the *Governance Structure*, *Governance Process*, and *Governance Outcome* periodically and draw up a report so that if there are shortcomings can be immediately carried out the necessary corrective actions and results reporting the self assesment Good Corporate Governance published. It is intended to increase the confidence of investors and the public againts the company has implemented the principles of Good Corporate Governance.

Keywords:*Governance Structure*, *Governance Process*, *Governance Outcome*, *Operational Risk* (BOPO).

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* terhadap *Operational Risk*. Mengidentifikasi lebih dalam tentang risiko operasional dalam pelaksanaan GCG di perbankan dengan melihat dari Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai indikator risiko operasional yang terjadi dan diukur dengan 3 aspek *Governance*, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Hasil analisis menemukan bahwa *GovernanceStructure* yang diwakilkan oleh Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO. *GovernanceProcess* yang diwakilkan Jumlah pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO, sedangkan Jumlah Remunerasi berpengaruh signifikan terhadap BOPO. *GovernanceOutcome* yang diwakilkan Jumlah Penyimpangan Internal berpengaruh signifikan terhadap BOPO.

Kata Kunci: *Governance Structure*, *Governance Process*, *Governance Outcome*, *Operational Risk* (BOPO).

A. Pendahuluan

Dalam lingkungan bisnis, tak terkecuali dunia perbankan yang semakin kompetitif membutuhkan suatu informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut, diperlukan suatu penilaian atau pengukuran terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Kinerja suatu bank sangat erat hubungannya dengan peran dan fungsi manajemen dari bank tersebut. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen bank, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya.

Kasus yang sempat mencuat yaitu kasus Bank Century pada bulan November 2008 diselamatkan pemerintah. Selain karena kalah kliring, diduga oknum Bank Century dari pihak manajemen dan pemilik yang melakukan pemalsuan dan penggelapan dana nasabah. Dalam kasus tersebut kegiatan *Corporate Governance* dalam Bank Century jelas tidak berjalan baik, terutama dalam *governance process* yang

mengakibatkan penyelewengan beberapa oknum yang merugikan pihak bank, terutama merugikan para *Stakeholders* dan *Shareholders*. Kejadian tersebut membuat masyarakat berpikir untuk menginvestasikan uangnya pada bank.

Uraian di atas merupakan fenomena yang saat ini terjadi di dunia industri perbankan. Dengan demikian maju tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen tersebut mengelola banknya masing-masing. Peran manajemen dalam mengelola bank menjadi sangat penting agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini mendorong pihak Bank Sentral dan Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk menunjang perkembangan perbankan di Indonesia, salah satunya PBI no: 15/15/DPNP yang mengatur tentang *Good Corporate Governance* atau GCG dan Pengelolaan Manajemen Risiko.

Sejak Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dikeluarkan pada tahun 1999, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Walaupun peringkat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia dirasakan ada peningkatan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dunia perbankan harus mengikuti prinsip dari GCG secara total.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) jelas sangat penting untuk saat ini, mengingat sekarang regulasi Bank Indonesia yang terbaru tentang penilaian kesehatan bank pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dimana Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank: Berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan struktur. Dengan adanya *Good Corporate Governance*/GCG kedalam tingkat penilaian kesehatan bank membuat elemen ini menjadi hal yang sangat mempengaruhi kinerja bank.

Good Corporate Governance/GCG merupakan elemen penting dalam operasional bank dalam melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) untuk analisis tingkat kesehatan bank. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran 15/15/DPNP yang disebutkan bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) atas tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi. Dengan peraturan terbaru, *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya lebih ditekankan pada aspek *structure*, sekaligus juga aspek *process* dan *outcome*. *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*, merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam pelaksanaannya. *Governance Process* merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan untuk mewujudkan komitmen dan *structure governance* sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG). Sedangkan *Governance Outcome* digunakan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

Untuk penilaian terhadap *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* memiliki tujuan dan maksud masing-masing dalam penilaiannya. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada bank. Sedangkan untuk penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang

didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Sedangkan untuk penilaian terakhir yaitu penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Hasil penelitian Bank Indonesia menunjukkan 60 persen perbankan masih melanggar *Good Corporate Governance*. Menurut Deputi Gubernur BI, Siti Fadriah pelanggaran yang terjadi terutama pada masalah komisaris independen dalam dewan komisaris. Kasus ini mencapai 53 persen. Selanjutnya pelanggaran dalam pembentukan komite mencapai 30,7 persen, tidak terpenuhinya jumlah komisaris independen sekitar 18 persen. (www.unisosdem.org,2007). Menurut beliau dengan penerapan GCG akan mendukung kinerja yang baik dari perbankan.

Hal tersebut dapat diukur dengan pendekatan manajemen risiko operasional karena dengan manajemen risiko operasional dapat melihat kemungkinan terjadinya risiko pada saat kegiatan operasional *governance* berlangsung. Kegiatan *governance* yang dimaksud adalah *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Risiko operasional mempunyai dimensi yang luas dan kompleks dengan sumber risiko yang merupakan gabungan dari berbagai sumber yang ada dalam organisasi, proses, dan kebijakan, sistem dan teknologi, orang, dan faktor-faktor lainnya (Muslich:2007:25). Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Basel II Capital Accord mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau dari kejadian-kejadian eksternal. Seiring meningkatkan keragaman dan kompleksitas produk dan aktivitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, perkembangan sistem dan teknologi informasi pendukung yang cepat, serta meningkatnya ekspektasi nasabah dari pelayanan yang diberikan, maka pengelola risiko operasional menjadi suatu elemen yang sangat penting. Manajemen risiko operasional digunakan untuk mengukur potensi kerugian operasional sebagai penilaian pemenuhan kecukupan modal untuk menutup kerugian dan strategi untuk menjaga tingkat kecukupan modal.

Isnanta (2007) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan komite audit. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa struktur kepemilikan, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba tetapi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Sari (2010) dalam penelitiannya tentang pengaruh mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja di Perbankan Nasional menyimpulkan bahwa hasil analisis menemukan Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Kedua, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukkan hubungan yang

positif namun tidak signifikan. Ketiga, Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal Big 4 menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

Penelitian tentang pengaruh komite terhadap implementasi GCG juga diteliti oleh Chitan (2010) menyatakan bahwa dengan adanya komite GCG pada bank, maka akan meningkatkan kinerja perbankan. Dengan demikian maka GCG berpengaruh positif terhadap kinerja bank.

Jumlah pelatihan sebagai variabel dari *governance process* dalam jurnal Djajendra (2011) tentang *Enterprise Risk Management* (ERM) mengatakan bahwa pelatihan memberikan motivasi dan pencerahan kepada organ-organ bank agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko bank, guna membangun dan merawat kontrol yang memadai, untuk memperbaiki setiap risiko yang berpotensi membahayakan eksistensi bank.

Sedangkan perubahan jumlah biaya remunerasi sebagai variabel dari *governance process* dalam teori agensi dikatakan bahwa mengatakan masalah keagenan juga akan timbul jika pihak manajemen atau agen perusahaan tidak atau kurang memiliki saham biasa perusahaan tersebut. Karena dengan keadaan ini menjadikan pihak manajemen tidak lagi berupaya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari beban yang ditanggung oleh perusahaan.

Jumlah penyimpangan internal sebagai variabel *governance outcome* merupakan hasil dari pelaporan Komite Strategi Anti Fraud yang merupakan dari kebijakan bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

B. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogianto, 2004:79). Populasi dalam penelitian ini meliputi 6 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Periode penelitian dilakukan tahun 2009-2013.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, yang digunakan dalam penelitian ini *Operational Risk* dengan menggunakan BOPO sebagai variabelnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 3 aspek *governance*. Aspek *governance* tersebut adalah *Governance structure* yang menjadi variabelnya adalah jumlah komite audit, komite remunerasi, komite pemantau risiko. *Governance process* yang menjadi variabelnya jumlah pelatihan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan dewan direksi, dan jumlah remunerasi. *Governance outcome* variabel adalah jumlah penyimpangan internal yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Berikut ini rumus untuk menentukan komite-komite:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{jumlah komite audit independen}}{\text{jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

$$\text{Komite Remunerasi} = \frac{\text{jumlah komite remunerasi independen}}{\text{jumlah seluruh komite remunerasi independen}}$$

$$\text{Komite Pemantau Risiko} = \frac{\text{jumlah komite pemantau risiko independen}}{\text{jumlah seluruh komite pemantau risiko independen}}$$

$$\text{BOPO} = \frac{\text{biayaoperasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pengaruh Governance Structure Terhadap Operational Risk

Pengujian Secara Simultan F tabel dengan $\alpha = 0,05$ atau 5%, $df_1 = k - 1 = 2$, dan $df_2 = n - k = 29$, maka di dapat $F_{\text{tabel}} 3,33$. Nilai F_{hitung} sebesar 1,013. Dikarenakan nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ ($1,013 < 3,33$) maka H_0 diterima, artinya Komite Audit ($X_{1,1}$), Komite Remunerasi ($X_{1,2}$), dan Komite Pemantau Risiko ($X_{1,3}$) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Kesimpulan ini diperkuat dengan melihat nilai signifikansi $0,403 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa pengungkapan Komite Audit ($X_{1,1}$), Komite Remunerasi ($X_{1,2}$), dan Komite Pemantau Risiko ($X_{1,3}$) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Pengujian secara parsial Komite Audit ($X_{1,1}$), Komite Remunerasi ($X_{1,2}$), dan Komite Pemantau Risiko ($X_{1,3}$) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO (Y).

Analisis Pengaruh Governance Process Terhadap Operational Risk

Pengujian Secara Simultan F tabel dengan $\alpha = 0,05$, $df_1 = k - 1 = 1$, dan $df_2 = n - k = 28$, maka di dapat $F_{\text{tabel}} 4,20$. Nilai F_{hitung} sebesar 6,640. Dikarenakan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($6,640 > 4,20$) maka H_1 diterima, artinya Jumlah Pelatihan ($X_{2,1}$), dan Jumlah Remunerasi ($X_{2,2}$) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Pengujian secara parsial Nilai T tabel dengan Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan $df = n - k / 30 - 3 = 27$ didapat nilai $t_{\text{tabel}} 2.05183$. Nilai t_{hitung} untuk Jumlah Pelatihan ($X_{2,1}$) sebesar 0,790 dan $t_{\text{tabel}} 2.05183$. Dikarenakan nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima, artinya Jumlah Pelatihatidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Kesimpulan ini semakin diperkuat dengan melihat nilai signifikansi $0,436 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa pengungkapan Jumlah Pelatihan ($X_{2,1}$), tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Nilai T tabel dengan Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan $df = n - k / 30 - 3 = 27$ didapat nilai $t_{\text{tabel}} 2.05183$. Nilai t_{hitung} untuk Jumlah Remunerasi ($X_{2,2}$) sebesar -3.627 dan $t_{\text{tabel}} 2.05183$. Dikarenakan nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_1 diterima, artinya Jumlah Pemberian Remunerasi berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Kesimpulan ini semakin diperkuat dengan melihat nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa pengungkapan Jumlah Pemberian Remunerasi ($X_{2,2}$), memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO (Y).

Analisi Pengaruh Governance Outcome Terhadap Operational Risk

Secara simultan F tabel dengan $\alpha = 0,10$ atau 10%, $df_1 = k - 1 = 2$, dan $df_2 = n - k = 29$, maka di dapat $F_{\text{tabel}} 2,89$. Nilai F_{hitung} sebesar 3,433. Dikarenakan nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($3,433 > 2,89$) maka H_1 diterima, artinya Jumlah Penyimpangan Internal (X_3), secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Kesimpulan ini diperkuat dengan melihat nilai signifikansi $0,074 < 0,10$ yang menunjukkan bahwa pengungkapan Jumlah Penyimpangan Internal (X_3), secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO (Y). Dan secara parsial Nilai T tabel dengan Tingkat signifikan (α) sebesar 10%, dan $df = n - k / 30 - 4 = 26$ didapat nilai $t_{\text{tabel}} 1,701$. Nilai T_{hitung} variabel Jumlah Penyimpangan Internal (X_3) sebesar -1,853 dan $t_{\text{tabel}} 1,701$. Dikarenakan nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($-1,853 > 1,701$), artinya H_0 ditolak, artinya Jumlah Penyimpangan Internal berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Kesimpulan ini diperkuat dengan melihat nilai signifikansi $0,074 < 0,10$ yang menunjukkan bahwa

pengungkapan Jumlah Penyimpangan Internal (X_3), secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO (Y).

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel *Governance Structure* terhadap variabel BOPO.
2. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial pada *Governance Process* dengan variabel Jumlah Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Sedangkan variabel Jumlah Pemberian Remunerasi berpengaruh signifikan terhadap BOPO.
3. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat pengaruh variabel *Governance Process* terhadap variabel BOPO secara signifikan.
4. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial pada *Governance Outcome* dengan variabel Jumlah Penyimpangan Internal berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Secara simultan terdapat pengaruh variabel *Governance Outcome* terhadap variabel BOPO secara signifikan.

E. Saran

Pihak Perusahaan :

1. Perusahaan melaksanakan penilaian atas pelaksanaan *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* secara berkala dan menyusun laporannya sehingga apabila masih terdapat kekurangan dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan dan hasil laporan self assesment Good Corporate Governance tersebut dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan bahwa perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance.

Peneliti selanjutnya:

2. Disarankan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor dan memperpanjang periode penelitian. Selain itu, menggunakan indikator penilaian rasio keuangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdi, Ridha. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2010, skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Ali, Masyhud. 2006. Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bringham, Eugene & F. Houston. 2006. *Fundamental of functional management*, alih bahasa oleh ali akbar yulianto, dasar-dasar manajemen keuangan, buku I, Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Salemba Empat.

Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance* (Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia), Jakarta: Ray Indonesia.

Dewi.K.retno dan Widagdo.Bambang”Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan”Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Kediri

Dunil, Z. 2005. *Bank Auditing: Risk Based Audit* Dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Erlina & Mulyani, Sri. 2007. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Medan: USU Press.

Erwan Dukat. 1999. *Alat-Alat Analisa Laporan Keuangan*.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariative dengan program SPSS*, Edisi 3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardy, D. C. D. I. O., Holden, P., & Prokopenko, V. (2003). *Microfinance Institutions and Public Policy. Policy Reform*

Horne, James C. Van danJhon M. Wachowicz, Jr. 1998. *Prinsip-prinsipManajemenKeuangan, Finance management polic*.Jakarta: SalembaEmpat.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Laporan Tahunan Bank Mandiri, www.bankmandiri.co.id

Laporan tahunan bank mega, www.bankmega.com

Laporan tahunan bank nisp, www.ocbcnisp.com

Laporan tahunan bank bni, www.bni.co.id

Laporan tahunan bank permata, www.permatabank.com

Laporan tahunan bank danamon, www.danamon.co.id

Marnov, Ninggolan. 2009. *Analisis Pengaruh LDR, NIM, DAN BOPO Terhadap Roa*, skripsi program sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Nazir M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Regar, Moenaf H. 2000. *DewanKomisaris (Peranannya Sebagai Organ Perseroan)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiarso, G dan Winarwi. 2006. *Manajemen Keuangan*. Cetakan kedua. Media Persindo, Yogyakarta

Sugiono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeth.

Surat Edaran 15/15/DPNP Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) atas tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Susanto, Priyatna Bagus dan Imam Subekti. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Universitas Brawijaya.

